**BAB IV**

**PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

1. **Penyajian Data**
2. **Profil Bank Syari’ah Mandiri (BSM)**
3. **Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya**

Nilai – nilai perusahaan yang menjujung tinggi kemanusiaan dan intergritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997 - 1998. Sebagai mana diketauhi, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi – dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. [[1]](#footnote-1)Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang di dominasi oleh bank – bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan Mereka pitalisiasi sebagian bank – bank di Indonesia. 1

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejateraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negaradan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan pengabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exsim, dan Bapindo ) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan pengabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger,* Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang member peluang Bank Umum untuk melayani transaksi Syariah (*Dual Banking System*).

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Dengan melakukan penggabungan (merger) dengan beberapa bank dan mengundang *investor* asing. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto,SH, No.23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI/No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/menyusul pengkukuhan dan pengakuan legal tersebut. PT Bank Syariah Mandiri Secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 23 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadu idealisme usaha dengan nilai – nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasional nya. Harmoni antara idealism usaha dan nilai – nilai rohani ini lah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprah nya diperbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya adalah Kantor Cabang yang ada di Lampung Tengah yang beralamat di Komp. Pertokoan Central Niaga Bandar Jaya No.1 - 3, JL. Proklamator Raya, Yukum Jaya, Lampung Tengah, Lampung. Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya berdiri sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang tetap menunjukan eksistensi nya sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah.[[2]](#footnote-2)

### Visi Dan Misi Bank Syariah Mandiri (BSM)

Ada pun visi dan misi yang di pegang teguh PT. Bank Syariah Mandiri yaitu:

### Visi

“Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia”

### Misi

* + - 1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata – rata industri yang berkesinambungan.
      2. Mengutamakan menghimpun dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
      3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
      4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
      5. Mengembangkan nilai– nilai syariah universal

1. **Jenis Produk Usaha yang ditawarkan Bank Syari’ah Mandiri**
2. **Produk Penghimpun Dana Bank Syariah Mandiri**
3. Tabungan
4. Tabungan BSM merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. Akad mudharabah muthlaqah adalah akad antara nasabah dan bank dimana nasabah memberikan kekuasaan penuh kepada pihak bank untuk mempergunakan dana milik nasabah untuk usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Bank Syariah Mandiri menawarkan bagi hasil yang kompetitif.
5. BSM Tabungan Berencana Sama dengan Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana ini juga menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Hanya saja pada tabungan berencana ini Bank Syariah Mandiri memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
6. BSM Tabungan Simpatik Tabungan simpatik ini menggunakan akad wadiah (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
7. BSM Tabungan Investa Cendekia Tabungan investa cendikia ini adalah tabungan berjangka yang ditujukan untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi asuransi. Tabungan investa cendikia menggunakan akad mudharabah muthlaqah.
8. BSM Tabungan Dollar Tabungan Dollar BSM adalah tabungan dalam mata uang dollar Amerika (USD) dimana penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. Tabungan Dollar BSM ini menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah (simpanan dijamin), artinya uang yang dititipkan kepada bank dapat dimanfaatkan oleh pihak bank. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak bank.
9. BSM Tabungan Pensiun Tabungan Pensiun BSM ini merupakan tabungan hasil kerjasama pihak Bank Syariah Mandiri dengan PT Taspen. Tabungan ini dikhususkan untuk pensiunan pegawai negeri di Indonesia dengan menggunakan mata uang rupiah dan akad mudharabah mutlaqah.
10. BSM Tabunganku TabunganKu atau TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabunganku di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad wadhi’ah yad dhamanah.
11. BSM Tabungan Mabrur Tabungan Marbrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah muthlaqah yang diperuntukan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
12. BSM Tabungan Mabrur Junior Sama dengan BSM Tabungan Mabrur, hanya saja tabungan ini dikhusukan bagi anak dibawah umur.
13. Giro
14. BSM Giro Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah melalui akad wadiah yad dhamanah.
15. BSM Giro Valas Sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar amerika (USD) berdasarkan akad wadiah yad dhamanah.
16. BSM Giro Singapore Dollar Sebagai sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar singapore (SGD) berdasarkan prinsip akad wadiah yad dhamanah.
17. BSM Giro Euro Sarana penyimpanan dana dalam bentuk EURO melalui akad wadiah yad dhamanah.
18. Deposito
19. BSM Deposito Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola sesuai dengan prinsip akad Mudharabah Muthlaqah.
20. BSM Deposito Valas Adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang dollar (USD) yang sesuai dengan akad Mudharabah Muthlaqah.
21. **Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri**
22. BSM Implan Adalah pembiayaan konsumer dalam bentuk valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan. Akad BSM Implan menggunakan akad Wakalah wal Murabahah untuk pembelian barang, sedangkan akad  Wakalah wal Ijarah digunakan untuk memperoleh manfaat atas jasa.
23. Pembiayaan Peralatan Kedokteran Merupakan pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran dengan akad murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.
24. Pembiayaan Edukasi BSM Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad ijarah.
25. Pembiayaan Kepada Pensiunan Pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensuinan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan) melalui akad murabahah atau ijarah.
26. Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya  
    Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.
27. Pembiayaan Griya BSM Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah dengan akad murabahah.
28. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi Pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi ini menggunakan akad murabahah.
29. Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan akad murabahah.
30. Pembiayaan Umrah Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah dengan akad Ijarah.
31. Pembiayaan Talangan Haji Pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.
32. BSM Gadai Emas Pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.
33. BSM Cicil Emas Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan).

## **Produk Jasa Bank Syariah Mandiri**

Bank Syari’ah Mandiri juga menyediakan produk jasa yaitu :

1. Jasa Produk
   1. BSM Card
   2. BSM Sentra Bayar
   3. BSM SMS Banking
   4. BSM Mobile Banking
   5. BSM Net Banking
   6. Pembayaran Melalui Menu Pemindahbukuan di ATM
   7. BSM Jual Beli Valas
   8. BSM Elektronic Payroll
   9. Transfer Uang Tunai
   10. BSM E-Money
   11. Keamananku
2. Jasa Operasional
   1. BSM transfer Lintas Negara Western Union
   2. BSM Kliring
   3. BSM Inkaso
   4. BSM Intercity Clearing
   5. BSM RTGS
   6. Transfer Dalam Kota
   7. BSM Transfer Valas
   8. BSM Pajak Online
   9. BSM Referensi Bank
   10. BSM Standing Order
   11. BSM Payment Point
   12. Layanan BSM Pembayaran Institusi
3. Jasa Investasi
   1. Reksadana
   2. Sukuk Negara Ritel

Produk Bank Syariah Mandiri diatas sewaktu-waktu dapat berubah (bertambah atau berkurang) sesuai dengan kebijakan pihak Bank Syariah Mandiri.

1. **Struktur Bank syariah mandiri Bandar jaya**
2. **Profil Bank Negara Indonesia (BNI) Multifinance**
3. **Sejarah berdirinya BNI Multifinance**

BNI Mutifinance Kantor Cabang Lampung berdomisili di Teuku Umar Lt.3, Jl. Teuku Umar No.17, Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Berdiri pertama kali dengan nama PT. BNI-AMEX Leasing pada tanggal 8 April 1983, kerjasama antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) dengan American Express Leasing Corporation (AELC). Tahun 1994 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.BNI mengambil alih seluruh saham American Express Leasing Corporation (AELC) di PT. BNI-AMEX Leasing, sehingga BNI menjadi pemegang saham tunggal dan mengganti nama perusahaan menjadi PT. Swadharma Multi Finance. Tahun 1995 PT. Swadharma Multi Finance resmi berganti nama menjadi PT. BNI Multifinance atau disebut BNIMF (untuk selanjutnya disebut Perseroan) dan dalam rangka menyesuaikan ketentuan UU PT. No. 1 tahun 1995, BNI melepas sebagian sahamnya kepada Koperasi Karyawan. PT. BNI Multifinance (Kopkar BNIMF) sebanyak 0,02%.

Pada Tahun1996 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) bersama Koperasi Karyawan PT. BNI Multifinance (Kopkar BNIMF) selaku Pemegang Saham Perseroan telah meningkatkan modal dasar menjadi Rp. 500 Miliar dan meningkatkan modal disetor menjadi Rp. 200 Miliar. Tahun2007 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) bersama Koperasi Karyawan PT. BNI Multifinance (Kopkar BNIMF) meningkatkan modal disetor menjadi Rp. 408 Miliar, atau 81,67% dari modal dasar Perseroan. Tahun 2008 Perseroan melakukan Kuasi Reorganisasi secara hukum dengan menurunkan nilai nominal saham dari Rp. 1.000,- menjadi Rp. 50,- untuk memperoleh agio saham. Setelah Kuasi Reorganisasi, nilai modal dasar serta modal disetor masing-masing menjadi Rp. 25 Miliar dan Rp. 20,418 Juta, sedangkan jumlah sahamnya masih tetap.

Pada bulan Februari 2013 tahun 2013 PT. BNI Multifinance mendapatkan Subordinate Loan dari Bank BNI sebesar Rp 75 Milyar, dimana pada bulan Juni 2013 Subordinate Loan tersebut di konversi menjadi tambahan Modal, sehingga modal disetor menjadi : Bank BNI sebesar Rp. 95.413.985.350,00 (sembilan puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan Koperasi Karyawan BNIMF sebesar Rp. 18.151.550,00 (delapan belas juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pada tanggal 17 Desember 2015, soft launching website baru PT. BNI Multifinance. Dan Pada tanggal 23 Juli 2016 para pemegang saham PT. BNI Multifinance menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan oleh perusahaan sebesar 4.060.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 50 per saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 203 Miliar yang diambil seluruhnya oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan disetorkan ke kas Perseroan, sehingga besarnya modal disetor menjadi Rp. 298.432.136.900,-.[[3]](#footnote-3)

1. **Visi Dan Misi Bank Negara Indonesia (BNI) Multifinance**

Adapun Visi dan Misi BNI Multifinance yaitu :

1. V I S I

Menjadi Perusahaan Pembiayaan yang sehat serta unggul dalam layanan dan kinerja.

1. M I S I

Menyediakan jasa pembiayaan yang bernilai tambah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumer, serta usaha kecil menengah untuk memaksimalkan stakeholder value.

1. **Jenis Produk Usaha yang ditawarkan BNI Multifinance**

Produk Pembiayaan BNI Multifinance yaitu :

1. Car Ownership Program (COP) Sebagai Partner yang handal dalam penyediaan *Kendaraan*bagi korporasi dalam memberikan benefit/ fasilitas kepada Pegawainya. Program COP adalah Pemberian Pembiayaan kepada Pegawai dengan pemberian benefit berupa program kepemilikan kendaraan baru kepada Pegawai pada jenjang jabatan dan grade tertentu, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perusahaan tempat Pegawai. Terdapat 3 pihak dalam pelaksanan Program ini, yaitu BNI Multifinance selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan, Perusahaan selaku pemberi keputusan Pegawai mana saja yang menerima fasilitas / benefit dan Pegawai selaku Debitur yang menerima fasilitas pembiayaan.  Untuk saat ini, cakupan layanan kami hanya:
2. BNI dan Group BNI
3. BUMN/ BUMD
4. Perusahaan Multinasional/ Go Public

Dengan area layanan meliputi Jabodetabek, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandar Lampung dan Medan.

1. Operating Lease (OPL) Sebagai Partner yang handal dalam penyediaan *Kendaraan Operasional* bagi korporasi melalui sewa untuk perencanaan pertumbuhan kinerja korporasi, yang tidak disertai dengan opsi membeli di akhir masa pembiayaan (sewa..murni).  
   Untuk saat ini , cakupan layanan kami hanya  :
   1. BNI dan Group BNI
   2. BUMN/ BUMD
   3. Perusahaan Multinasional/ Go Public

Dengan area layanan meliputi Jabodetabek, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandar Lampung dan Medan.

1. Investasi –Installment Financing Sebagai Partner yang handal dalam penyediaan *Kendaraan Operasional* bagi korporasi dengan pilihan kepemilikan langsung atas kendaraan Operasional.  
   Untuk saat ini , cakupan layanan kami hanya  :
   1. BNI dan Group BNI
   2. BUMN/BUMD
   3. Perusahaan Multinasional/Go Public

Dengan area layanan meliputi Jabodetabek, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandar Lampung dan Medan.

1. Pembiayaan Multiguna Kendaraan Untuk Individu yang membutuhkan sarana dan penunjang gaya hidup dapat memanfaatkan fasilitas peembiayaan Mobil Baru, dengan pola pembayaran angsuran dan jangka waktu yang diperjanjikan. Untuk saat ini , cakupan layanan kami adalah :
2. Bagi Pegawai Group BNI
3. Bagi Nasabah Prima Bank BNI & Nasabah dengan Payroll di BNI

Dengan area layanan meliputi Jabodetabek, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandarlampung dan Medan.

1. Pembiayaan Elektronik Untuk memenuhi kebutuhan konsumtif Debitur, kami hadir menyediakan Fasilitas Pembiayaan Elektronik dengan cakupan Pembiayaan Alat-Alat Rumah Tangga (Home Appliance), antara lain seperti furniture, peralatan dapur, AC, Freezer dan Fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang-barang elektronik, antara lain  seperti Notebook, Smartphone, Tablet, Alat Musik dan Genset Untuk saat ini , cakupan layanan kami hanya  :
   1. Bagi Pegawai Group BNI
   2. Bagi Nasabah Prima Bank BNI & Nasabah dengan Payroll di BNI

Dengan area layanan meliputi Jabodetabek, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandar Lampung dan Medan.

1. Pembiayaan Motor Kini hadir untuk Anda pilihan terbaru dan terbaik untuk kebutuhan pembiayaan sepeda motor Anda. Wujudkan keinginan Anda untuk memiliki sepeda motor berbagai jenis dan merk dengan banyak kemudahan, miliki sepeda motor baru Anda saat ini juga. Untuk saat ini , cakupan layanan kami adalah :
   1. Bagi Pegawai Group BN
   2. Bagi Nasabah Prima Bank BNI & Nasabah dengan Payroll di BNI

Dengan area layanan meliputi Jabodetabek, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandar Lampung dan Medan.

1. Pembiayaan Investasi Korporasi yang bergerak dalam usaha produktif, memerlukan investasi dan pengaturan cashflow yang baik, kami hadir menyediakan pembiayaan  untuk pengadaan :
   1. Truk dan Bis

Kami menyediakan fasilitas pembiayaan untuk transportasi darat dengan truk dan bis sebagai obyek pembiayaan.

* 1. Heavy Equipment / Alat Berat

Kami juga menyediakan pembiayaan alat berat untuk berbagai sektor industri (Pertambangan, Konstruksi, Agribisnis, dan Industri Minyak/ Gas) yang menggunakan berbagai jenis alat berat dalam kegiatan operasional-nya, seperti excavator, bulldozer, berbagai jenis crane, heavy truk, forklift, Wheel Loader, Articulated Dump Truck ,Genset, Compactor, Tower Lamp dll

* 1. Mesin-mesin Industri / Industrial Machinery

Kami juga melayani pabrikan dengan berbagai sektor bisnis untuk membiayai rencana investasi mereka atas mesin-mesin produksi, seperti :

1. Mesin Cetak Offset & Digital printing
2. Mesin Milling, Welding & Lathe
3. Peralatan kesehatan
4. mesin pengolahan logam
5. Peralatan bengkel mobil
6. Mesin Injection moulding and plastic machinery
7. genset dan mesin-mesin industri lainnya

Dengan proses yang cepat dan flexibel, kami siap membantu para pelaku usaha untuk terus maju dan berkembang.

Dengan area layanan meliputi Jabodetabek, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandar Lampung dan Medan.

1. Pembiayaan Multiguna-Properti

Untuk memenuhi kebutuhan konsumtif Debitur, kami hadir menyediakan Fasilitas Pembiayaan Properti  dengan cakupan Pembelian Rumah (KPR/KPA/Ruko) baik baru maupun purna jual dan Renovasi Rumah. Melalui proses yang cepat dan lebih fleksibel untuk memperoleh rumah dengan cara mengangsur sesuai..kemampuannya.  
Untuk saat ini, cakupan layanan kami adalah :

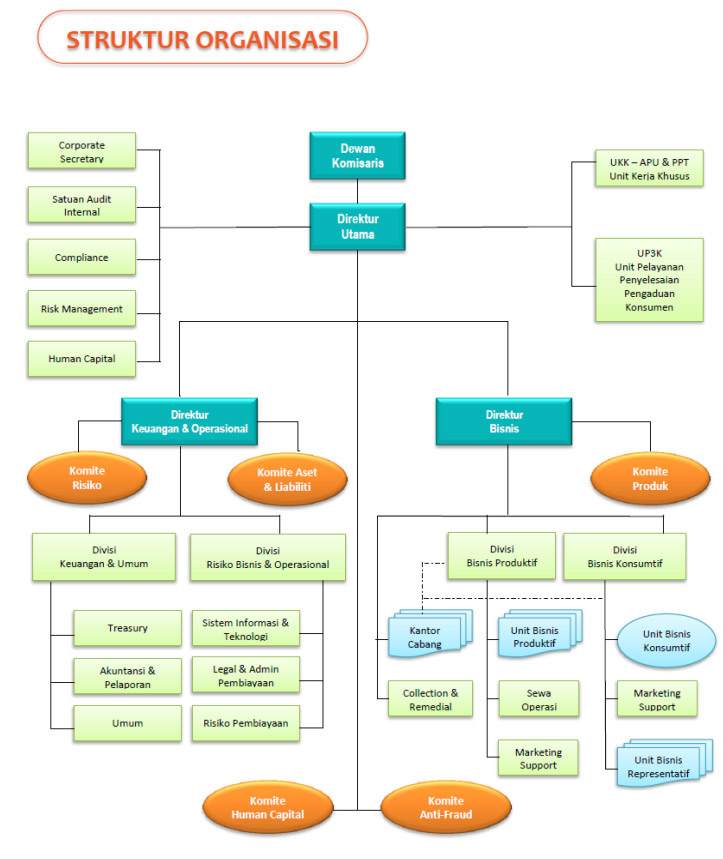
* 1. Bagi Pegawai Group BNI
  2. Bagi Nasanah Prima Bank BNI & Nasabah dengan Payroll di BNI

1. Pembiayaan Multiguna-Jasa

Untuk memenuhi kebutuhan konsumtif Debitur, kami hadir menyediakan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Jasa   dengan cakupan Pembiayaan Jasa Ibadah, Jasa Pendidikan, Jasa Pariwisata dan Jasa Pernikahan melalui pihak ketiga yang ditunjuk selaku penyedia barang dan atau jasa dengan jaminan fixed..asset.

Untuk saat ini, cakupan layanan kami adalah :

1. Bagi Pegawai Group BNI
2. Bagi Nasanah Prima Bank BNI & Nasabah dengan Payroll di BNI
3. **Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia (BNI) Multifinance**

**Gambar 4.2**

1. **Analisis Data**

**B. Analisi data**

**1. Implementasi Akad Pembiayaan Jual Beli Kendaraan**

**a. Pelaksanaan Prosedur Akad Pembiayaan Jual Beli Kendaraan di Bank Syari’ah Mandiri (BSM)**

1) Pelaksanaan hukum jual beli kendaraan dengan menggunakan akad murabahah.

Berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional no.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum *murabahah* ; nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank harus memberi tau secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Serta harga jual yang ditawarkan tersebut tidak akan pernah berubah sampai jangka waktu tertentu.

Menurut Ahmad Marison[[4]](#footnote-4), akad *murabahah* pada bank syariah mandiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

* + 1. *Murabahah* dengan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya; dalam hal ini setelah nasabah mengajukan permohonan pembelian sebuah kendaraan dengan angsuran maka pihak bank akan mencarikan barang kepada deler sesuai barang merk yang diinginkan nasabah. Menurut Ahmad Marison nasabah dapat membatalkan pemesanan tersebut dan kami pihak bank harus menerima karena pemesanan tersebut belum bersifat mengikat baik antara nasabah maupun pihak bank.
    2. *Murabahah* dengan tanpa pesanan, pada *murabahah* tanpa pemesan ini jarang disediakan oleh bank dikarenakan bank telah ada kerjasama dengan deler – setelah nasabah mengajukan permohonan baru pihak bank memesan barang sesuai keinginan nasabah.

Menurut Ahmad Marison[[5]](#footnote-5), pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah mandiri meliputi pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan seperti; pembiayaan BSM mikro, BSM bisnis banking, dan BSM komersil. Sedangkan pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk tujuan konsumsi seperti, BSM griya, BSM oto (mobil baru), BSM cicil emas, BSM pensiunan, dan BSM implan.

Pembiayaan baik produktif maupun konsumtif yang telah disediakan oleh bank adalah pembiayaan *murabahah* dimana pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan komsumtif salah satunya jual beli kendaraan dengan tunai atau dengan angsuran, jika nasabah mengajukan permohonan untuk membeli kendaraan dengan angsuran dan menyampaikan merk kendaraan, maka bank akan mengecek kepada deler yang telah kerjasama kepada bank syariah, selanjutnya bila kendaraan yang dipesan sesuai merk ada, maka bank memberi tahu kepada nasabah bahwa barang yang dipesan ada atau tersedia.

Menurut Ahmad Marison[[6]](#footnote-6), setelah nasabah mengajukan permohonan dan barang yanhg dipesan tersedia maka pihak bank syariah menyampaikan persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan oleh nasabah seperti:

* + - 1. Data identitas

Data identitas ini akan digunakan oleh pihak bank untuk melakukan survei ke lapangan dan membuktikan domisili dan kemampuan nasabah untuk pembayaran terhadap angsuran kendaraan yang ia beli.

* + - 1. Membuka rekening tabungan

Membuka rekening tabungan merupakan syarat yang wajib dipenuhi karena proses pembayaran angsuran yang akan dilakukan nasabah akan melalui rekeningnya apabila pembiayaan yang diajukan dapat diterima oleh bank.

* + - 1. Uang muka

Berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank syariah, maka nasabah menyediakan uang muka minimal 20% (dua puluh persen) dari harga pokok kendaraan dan pembiayaan 80% ditanggung oleh bank syariah.

Menurut Ahmad Marison[[7]](#footnote-7), setelah persyaratan diatas disampaikan pada nasabah dan nasabah setuju maka pihak Acoun Oficer (AO) membuat struktur pembiayaan yang akan disampaikan kepada komite pembiayaan. Dalam struktur pembiayaan tersebut telah tertulis dengan jelas harga pokok, keuntungan yang akan diambil oleh bank, angsuran, dan pembiayaan lainnya.

Dengan struktur pembiayaan sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | Jenis Pembiayaan | : Murabahah |
| (2) | Tujuan penggunaan | : Pembelian 1 unit mobil |
| (3) | Harga beli | : Rp.200.000.000.00,- |
| (4) | Margin Bank | : Rp. 53.600.000.00,- + |
| (5) | Harga Jual Bank | : Rp.253.600.000.00,- |
| (6) | Angsuran pendahuluan | : Rp. 40.000.000.00,- - |
| (7) | Pembayaran yang diangsur | : Rp.213.600.000.00,- |
| (8) | Pembiayaan Bank | : Rp.160.000.000.00,- |
| (9) | Jangka waktu | : 60 bulan |
| (10) | Angsuran per bulan | : Rp.3.560.000.,- |

Dari struktur pembiayaan diatas Bank memperoleh keuntungan 26,80%. Selanjutnya, angsuran yang harus dilakukan oleh Alek selama lima tahun sekitar Rp. 3.560.000,00 perbulan. Angsuran tersebut akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam rekening setelah itu pihak bank akan memotongnya setiap bulan dari rekening nasabah menurut Ahmad Marison[[8]](#footnote-8). Jumlah angsuran yang dilakukan oleh nasabah tersebut tidak akan pernah berubah sampai jangka waktu permohonan pembiayaan. Selanjutnya pihak nassabah dalam pembayaran angsuran kendaraan membayar kepada Mandiri Tunas Finence (MTF) sebagai grup yang mengurusi semua pembayaran Angsuran dari Nasabah. Jika sampai jangka waktu tersebut nasabah belum dapat melunasinya, maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Dan akan memberikan perpanjangan jangka waktu sesuai dengan jangka waktu akad pembiayaan awal.

1. Pelaksanaan Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah.

Untuk mengabulkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah terhadap pembelian kendaraan dengan angsuran agar dana dapat dicairkan maka bank syariah melakukan beberapa tahap pemeriksaan terhadap nasabah dan tahapan-tahapan sebagai berikut[[9]](#footnote-9).

* + 1. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah

Pada tahapan ini nasabah akan diwawancara mengenai pekerjaan nasabah dan kebutuhan nasabah terhadap pembiayaan yang ia kehendaki permohonan nasabahtersebut dapat dilanjutkan atau tidak, jika dapat dilanjutkan maka pihak bank akan merekomendasikan kepada deler yang telah ada kerjasama.

Selanjutnya mengenai informasi yang wajib diminta oleh pihak bank pada saat wawancara sebagai berikut:

(1) Status pemohon, apakah pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan perorangan atau badan usaha. Bila diajukan untuk perorangan maka harus diketahui status pernikahannya, mengetahui pekerjaannya atau profesinya dan dilakukan oleh calon nasabah yang telah cakap hukum, yaitu telah berusia 21 tahun. Dan bila diajukan untuk mewakili badan usaha maka harus diketahui terlebih dahulu bentuk badan usaha tersebut, apakah berbentuk PT, CV, koperasi, yayasan atau badan usaha lainnya. Mengetahui status pemohon akan berguna untuk legalitas pemohon yang harus dipenuhi. Setelah mengetahui status pemohan, maka pihak bank akan memberikan formulir untuk diisi. Formulir tersebut berisikan data pribadi nasabah berupa nama, alamat, tempat tinggal, serta tujuan mengajukan permohonan pembiayaan.

(2) Domisili calon nasabah, dalam melakukan pengawasannya terhadap calon nasabah yang dibiayai maka pihak bank harus mengetahui domisili dari calon nasabah tersebut. Walaupun bank menilai bahwa calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, tetapi nasabah berada di luar jangkauan wilayah kerja bank, maka pihak bank akan mengalami kesulitan dalam monitoring pembiayaan. Dan apabila terjadi hal demikian maka pihak bank tidak mengabulkan permintaan pembiayaan atau merekomendasikan ke bank syariah di dekat tempat tinggalnya.

(3) *Repayment capacity* (kemampuan membayar), pertanyaan ini sangat penting bagi bank karena melalui pertanyaan ini bank dapat mengetahui kondisi keuangan nasabah saat ini dan perkiraan kemampuan membayarnya. Informasi yang dapat ditanyakan berupa sumber penghasilan calon nasabah. Apakah berasal dari gaji atau hasil usaha, apakah bersifat kontinyu (rutin) atau musiman. Selain informasi dari sumber penghasilannya, pihak bank juga akan menanyakan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon nasabah. Dari informasi tersebut, pihak bank akan menghitung perkiraan angsuran sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.

b) Pemenuhan data dan dokumen

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap pengisian formulir tersebut. Di mana pihak nasabah diwajibkan memenuhi data yang diinginkan oleh pihak bank untuk dilakukan analisis. Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh pemohon berupa dokumen- dokumen yang mendukung permohonan. Apabila pengajuan permohonan pembiayaan tersebut dilakukan secara perorangan maka data dan dokumen yang harus dipenuhi ialah :

* 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri/SIM/Paspor
  2. Kartu keluarga
  3. Surat keterangan bekerja dari perusahaan atau tempat calon nasabah bekerja
  4. SK pengangkatan terakhir dan
  5. akta nikah, jika telah bercerai maka perlu dilampirkan juga surat/akta cerai.
  6. Slip gaji asli dan copy rekening bank. Dalam praktiknya, pihak bank akan meminta kepada pemohon untuk menyerahkan surat *standing instruction,* yaitu surat kuasa karyawan kepada perusahaan tempatnya bekerja untuk melakukan pembayaran gaji melalui bank pemberi pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran jika pembiayaan yang diajukan pemohon telah disetujui oleh pihak bank.

Dan apabila diajukan untuk mewakili badan usaha, maka persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

KTP pengurus perusahaan

Akta pendirian dan perubahan perusahaan

Pengesahan pendirian badan hukum tersebut dari instansi yang berwenang, seperti pengesahan pendirian PT oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

SITU (Surat Izin Tempat Usaha

TDR (Tanda Daftar Rekanan)

SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Company Profile

Dokumen lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha yang dijalankan, seperti sertifikat anggota suatu asosiasi, sertifikat halal dari MUI, sertifikat produk terkait uji mutu, dan sebagainya.

Laporan keuangan 2 tahun terakhir berupa neraca dan laporan laba/rugi.

Bukti-bukti administrasi transaksi usaha seperti catatan penjualan dan pembelian serta copy rekening bank 3 bulan terakhir.

Untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai calon nasabah tersebut, pihak *account officer* memerhatikan aspek 5C atau yang biasa disebut dengan *The Five C‟s of Credit Analysis*. Analisis 5C tersebut, yaitu :

(a) *Character,* yakni menggambarkan watak dan kepribadian dari calon nasabah. Untuk dapat menilai watak atau karakter dari individu tersebut, pihak bank dapat memperolehnya pada data BI checking dan informasi dari pihak lain, seperti dari mitra kerja calon nasabah tersebut.

(b) *Capacity*, yakni mengetahui kemampuan keuangan pemohon dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.

Mengetahui kemampuan keuangan pemohon sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Untuk mengetahui kondisi keuangan dari pemohon tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan dan memeriksa slip gaji dan rekening tabungannya.

(c) *Capital*, yaitu modal yang dimiliki oleh pemohon, termasuk juga penilaian atas aspek keuangan pemohon.

(d) *Condition*, yakni analisis mengenai kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Tetapi untuk bagian ini bank syariah tidak terlalu fokus terhadap pembiayaan konsumsi. Bank hanya akan mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini dan akan datang, sehingga pihak bank dapat memprediksi ekonomi calon nasabah tersebut. Pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam mengambil keputusan pembiayaan.

(e) *Collateral*, yakni penilaian atas aspek jaminan yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan yang mengalami kemacetan.

Dari 5C di atas, yang menjadi perhatian utama dari bank syariah cuma ada tiga, yaitu *character, capacity* dan *collateral*. 3C ini sangat penting dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan karena 3C ini sangat berperan penting dalam mengembalikan dana pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah.

Selain data di atas, pihak bank juga memerlukan data eksternal pemohon. Data eksternal pemohon diperlukan untuk melihat kondisi pemohon dari berbagai sisi, yaitu:

(1) SID-BI (Sistem Informasi Debitor – Bank Indonesia), merupakan sistem pelaporan debitor/nasabah pembiayaan perbankan kepada Bank Indonesia. Melalui SID tersebut, pihak bank dapat mengetahui seseorang sedang atau tidak menikmati fasilitas pembiayaan atau kredit dari bank lain. Bila tercantum seseorang sedang menikmati fasilitas dari bank lain, maka dapat diketahui informasi terkait pembiayaannya meliputi:

(a) Nama bank pemberi fasilitas

(b) Plafon dan outstanding terakhir fasilitas

(c) Jaminan yang diikat oleh bank

(d) Kondisi kolektibilitas (tingkat kelancaran) pembayaran kewajiban nasabah kepada bank.

(2) DHN (Daftar Hitam Nasional), yaitu pelaporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait nasabah yang mengalami *black list* karena adanya indikasi manajemen keuangan yang kurang baik dari pihak pemohon. Hal ini wajib diwaspadai oleh pihak bank terkait kondisi keuangan pemohon pembiayaan apabila namanya tercatat sebagai *black list* dalam DHN.

(3) *Negative list*, yaitu kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap sektor usaha yang dapat dibiayai dan tidak dapat dibiayai. Hal ini didasari dari segi rating sektor usaha yang dapat dibiayai menurut ketentuan internal bank dan menghindari sektor usaha yang masuk kategori *negative list.*

(4) *Trade checking,* yaitu suatu kegiatan pengecekan melalui pihak ketiga atas segala informasi yang dibutuhkan mengenai pemohon. Salah satu data yang diminta bank dalam permohonan pembiayaan adalah data mitra kerja usaha pemohon, baik supplier (pemasok) maupun pembeli. Melalui supplier, pihak bank dapat memperoleh informasi mengenai jenis dan jumlah barang serta pola pembayarannya dan bagaimana hubungan bisnis para supplier dengan pemohon. Data *trade checking* ini dibutuhkan jika tujuan pengadaan barang/kendaraan tersebut digunakan sebagai penunjang usaha.

c) Pengajuan Pembiayaan

Dalam pengajuan pembiayaan ini usulannya berbentuk proposal yang ditujukan kepada komite pembiayaan, komite pembiayaan merupakan pejabat bank yang mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan persetujuan pembiayaan. Selanjutnya komite pembiayaan mengadakan rapat dengan Acoun Oficer (AO) membahas usulan pembiayaan mengenai kelayakan nasabah terhadap pembiayaan yang ia usulkan. Seperti data dan dokumen, setelah data dan dokumen diperiksa dan dianggap lengkap maka pigak komite pembiayaan membuat keputusan disetujui atau tidak, jika tidak disetujui maka Acoun Oficer memberitahukan pihak nasabah bahwa usulan pembiayaan yang saudara usulkan ditolak. Selanjutnya jika disetujui maka komite pembiayaan membuat surat penegasan persetujuan pembiayaan yang ditujukan kepada pihak nasabah.

1. Penerbitan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3)

Setelah nasabah diterima atau disetujui oleh komite pembiayaan selanjutnya penerbitan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) yang ditujukan kepada nasabah bahwa nasabah disetujui pembiayaan yang diusulkannya. Dalam SP3 telah tercantum struktur pembiayaan dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaan dicairkan. Dalam struktur pembiayaan telah diteapkan harga pokok, keuntungan yang telah diambil oleh bank secara jelas, dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah seperti: biaya notaris, dan biaya administrasi lainnya yaitu biaya materai.

Selanjutnya jika nasabah menyetujui dan menyepakati sebagaimana isi dari surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) tersebut dilanjutkan penandatanganan surat persetujuan tersebut.

1. Perjanjian akad

Setelah nasabah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan oleh pihak bank yang telah dicantumkan pada surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) maka pihak nasabah menandatangani akad untuk melakukan pencairan dana. Menurut Ahmad Marison[[10]](#footnote-10), dalam perjanjian penandatangan akad hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

* + - * 1. Para pihak yang membuat akad, di mana dalam akad tersebut harus disebutkan para pihak yang membuat akad. Dan pihak tersebut harus memenuhi syarat hukum yaitu cakap dalam bertindak. Dikatakan cakap menurut hukum jika nasabah tersebut telah berusia 21 tahun atau telah menikah walaupun belum berusia 21 tahun serta harus menyebutkan bahwa nasabah tersebut bertindak untuk siapa.
        2. Tujuan dan objek akad, di mana dalam pembuatan akad tersebut pihak bank harus mencatat tujuan dari permohonan pembiayaan tersebut. Dan pihak nasabah diberikan kebebasan dalam menentukan objek perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.
        3. Menyebutkan waktu dan tempat perjanjian dibuat, di mana pihak bank harus menyebutkan waktu akad tersebut dibuat serta tempat pembuatan akad.
        4. Lama permohonan pembiayaan, dalam akad tersebut harus diketahui pada saat dan berakhirnya jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh pihak nasabah. Dan berakhirnya jangka waktu tersebut harus diketahui dan disepakati sejak awal perjanjian.
        5. Jumlah dana, di mana pihak bank harus menyebutkan dana yang diberikan dalam pembiayaan serta jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah tiap bulannya.
        6. Hak dan kewajiban dalam akad, pihak bank harus menyebutkan hal apa saja yang boleh dilakukan oleh nasabah dan hal yang dilarang selama berlangsungnya perjanjian tersebut.
        7. Proses penyelesaian permasalahan, pihak bank akan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh pihak bank dalam menghadapi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.
        8. Jaminan, di mana pihak bank menyebutkan pula objek jaminan dalam akad tersebut.
        9. Pilihan hukum, di mana pihak bank akan menyebutkan tempat penyelesaian masalah terhadap debitor yang melakukan wanprestasi.

Dalam penanda tanganan akad terdapat tiga pihak yang melakukan penanda tanganan, yaitu pemimpin cabang bank syariah dan pihak nasabah adalah suami istri, bila masih bujang atau gadis maka cukup satu orang saja nasabah yang menanda tanganinya. Selanjutnya untuk pencairan pembiayaan di butuhkan kelengkapan dokumen-dokumen seperti:

(a) Surat permohonan pencairan pembiayaan, sebagai dasar bagi pihak bank untuk mencairkan pembiayaan.

(b) Surat tanda terima uang tunai, biasa disebut sebagai TATUNA.

(c) Surat Aksep/Promes, merupakan surat berharga yang berisi kesanggupan nasabah untuk membayar kewajibannya sesuai jumlah dan dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

(d) Surat Kuasa Wakalah, yaitu dokumen yang diperlukan bagi realisasi pembiayaan *murabahah*, di mana bank sebagai penjual mewakilkan pembelian suatu barang kepada nasabah untuk kepentingan nasabah tersebut.

(e) Surat kuasa debet dari nasabah kepada bank, untuk melakukan pendebetan rekeningnya untuk membayar angsuran kendaraan yang sudah menjadi kewajibannya sebagai penerima pembiayaan.

Setelah semua berkas ditanda tangani maka pihak bank menghubungi deler yang telah ada kerjasama dengan pihak bank dan langsung menyerahkan kendaraan kepada nasabah, dan sebagai jaminannya adalah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan.

**b. Pelaksanaan Prosedur Pembiayaan Jual Beli Kendaraan di Bank Negara Indonesia Multifinance (BNI.MF).**

Pelaksaaan Jual Beli Kendaraan BNI Multifinance.

BNI Multifinance merupakan lembaga pembiayaan non bank dan merupakan saham dari Bank Negara Indonesia (BNI). BNI Multifinance menurut Usman Saudin[[11]](#footnote-11). Memiliki jenis produk yang ditawarkan Multifinance kepada nasabah yaitu:

Cara Ownership Program (OPL) sebagai partner penyediaan kendaraan para pegawai.

Operating Lease (OPL) sebagai partner penyediaan kendaraan oprasional bagi korporasi melalui sewa.

Investasi-Instalmen Financing sebagai partner penyediaan kendaraan oprasinonal bagi korporsi dengan pilihan kepemilikan langsung.

Pembiayaan multiguna kendaraan untuk individu dengan pola pembayaraan angsuran dan jangka waktu yang dijanjikan.

Pembiyaaan Elektronik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Cakupan pembiyaan rumah tangga antara lain seperti, peralatan dapur, AC. Dll.

Pembiyaan motor.

Pembiyaan Investasi dalam usaha produkti.

Seperti: Truk dan Bis, Alat berat, Mesin-mesin industri.

Pembiyaan multiguna properti.

Pembiyaan multiguna jasa.

Menurut Usman Saudin[[12]](#footnote-12) BNI Multifinance menyediakan pembiyaan tersebut diatas diperuntukan konsumen pribadi dan komersil, maksud dari konsumen pribadi adalah bersifat idividu dan komersil bersifat badan hukum. Pada saat konsumen baik pribadi atau komersil datang ke BNI Multfinance di pertanyakan oleh pihak marketing pembiyaan apa yang di butuhkan dan langsung diberikan brosur untuk dapat memiliki tipe apa yang diperlukan oleh si pembeli secara kontan atau angsuran (Kridit) sudah dilampirkan dalam brosur yang telah disediakan termasuk uang muka atau angsurannya.

Disini dapat penulis berikan contoh salah satu brosur yang berisiksan struktur pembiayaan sebagai berikut:

1. Jenis pembiayaan: jual beli
2. Tujuan kegunaan: pembelian satu unit kendaraan
3. Harga jual: Rp. 209.000.000,00-
4. Uang muka: Rp. 64.166.000,00-
5. Angsuran/bulanan: Rp. 4.415.000,00-
6. Jangka waktu= 60 bulan

Dari struktur pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Indonesia Multifinance diatas sulit dipahami berapa keuntungan yang diperoleh oleh bank, oleh sebab itu untuk mengetahui berapa keuntungan bank negara indonesia multifinance, maka dibawah ini dibuatkan struktur pembiayaan seperti Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

* 1. Jenis Pembiayaan : Jual Beli
  2. Tujuan Kegunaan : Pembelian Satu Unit Kendaraan
  3. Harga Beli : Rp. 200.170.000.00,-
  4. Bunga Bank : Rp. 129.896.000.00,-
  5. Harga Jual Bank :Rp. 329.066.000.00,-
  6. Angsuran Pendahuluan : Rp. 64.166.000.00,-
  7. Pembayaran yang diangsur : Rp. 264.900.000.00,-
  8. Pembiayaan Bank :Rp. 200.170.000.00,-
  9. Jangka Waktu : 60 Bulan
  10. Angsuran Perbulan : Rp. 4.415.000.00,-

Dari uraian struktur pembiayaan diatas keuntungan yang diperoleh oleh Bank Multifinance 64.39% berdasarkan bunga bank. Menurut Usman Saudin[[13]](#footnote-13) jika konsumen telah setuju untuk membeli kendaraan yang bersifat kridit maka konsumen tersebut diberikan persyaratan-persyaratan yang perlu di isi, tujuan dari persyaratan itu untuk mengetahui tentang keberadaan konsumen demi menjaga hal-hal yang akan menimbulkan permasalahan antara konsumen dan multifinance.

Pelaksanaan Tahapan Jual Beli Kendaraan BNI Multifinance.

Tahapan-tahapan ini sangat penting dilakukan oleh BNI Multifinance untuk menyamakan data yang telah dimasukan oleh pihak konsumen adapun tahapan yang dilaksakan oleh pihak BNI Multifinance adalah[[14]](#footnote-14):

Pengajuan Permohonan

Pada tahap ini BNI Multifinance menerima permohonan dari konsumen yang berisikan persyaratan-persyaratan yang telah disampaikan oleh pihak BNI Multifinance adapun informasi yang harus diketahui adalah sebagai berikut:

* 1. Status pemohon, kepentingan badan usaha atau perorangan, bila perseorangan maka harus diketahui status pernikahannya, pekerjaannya dan propesinya dan telah berusia diatas 22 tahun atau dianggap telah cukup hukum bila diajukan untuk kepentingan badan usaha, apakah berbentuk PT atau CV.
  2. Domisili, tujuannya untuk mengetahui apakah nasabah tersebut masuk wilayah jangkauan telah disepakati atau tidak jika tidak masuk maka dapat dibatalkan atau diberikan kepada cabang BNI Multifinance terdekat.
  3. Repayment Capacity (Kemampuan Membayar) pihak BNI Multifinance akan mencari informasi tentang pendapatan konsumen, apakah berasal dari gaji atau hasil usaha. Untuk menjaga kelancaran pembayaran angsuran kridit.

Pemenuhan Data dan Dokumen (Survei)

Bila pengajuan secara perseorangan maka data dan dokumen yang harus dopenuhi yaitu:

* 1. KTP suami istri
  2. Kartu keluarga (KK)
  3. Surat keterangan bekerja
  4. SK pengangkatan terakhir
  5. Akte nikah / akte cerai
  6. Slip gaji dan copy rekening bank

Bila pengajuan untuk badan usaha maka data dan dokumen yang harus dipenuhi yaitu:

1. KTP Pengurus Perusahaan
2. Akte pendirian dan perubahan perusahaan
3. Pengesahan pendirian badan hukum
4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
5. SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan)
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
7. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
8. TDR (Tanda Daftar Rekaman)
9. SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi)
10. Company profile
11. Dokumen lainnya seperti sertifikat anggota Asosiasi
12. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
13. Bukti-bukti administrasi transaksi usaha seperti catatan penjualan dan pembelian serta copy rekening bank 3 bulan terakhir.

Selain hal tersebut di atas pihak BNI Multifinance memperhatikan aspek 5.C yaitu:

1. Character (Waktu Kepribadian)
2. Capacity (Kemampuan Keuangan)
3. Capital (Modal yang dimiliki)
4. Condition (Kondisi Perekonomian)
5. Coleteral (Aspek Jaminan)

BNI Multifinance juga memerlukan data external pemohon dengan tujuan untuk melihat kondisi pemohon dari berbagai sisi yaitu:

* + - * 1. Sistim Inpormasi Dibitor Bank Indonesia (SID-BI)

Tujuan ini adalah pihak BNI Multifinance dapat mengetahui bahwa seseorang telah mendapatkan kridit atau tidak dari bank lain.

* + - * 1. Daftar Hitam Nasional (DHN)

Tujuannya untuk mengetahui apakah sipemohon ada indikasi kurang baik terhadap pengkriditan yang lainnya.

c) Penanda Tanganan Perjanjian

Setelah data diatas dianalisa, maka pihak BNI Multifinance dapat mengeluarkan surat keputusan diterima atau ditolak, jika ditolak maka pihak konsumen diberitahukan secara lisan bahwa berdasarkan data –data saudara yang telah kami analisa belum memenuhi syarat bahwa saudara terdapat daftar Hitam Nasional. Selanjutnya bila konsumen diterima maka pihak BNI Multifinance mengeluarkan surat keputusan bahwa saudara diterima dan langsung dipertanyakan kepada pihak konsumen tipe kendaraan yang mau diambil, dan uang muka yang dipilih kecil atau sedang sesuai ketentuan yang ada di brosur dan jangka waktu angsuran kridit dan biaya lainnya, jika pihak konsumen dan BNI Multifinance sama-sama setuju maka pihak Multifinance memberikan surat atau Paiman Order (PO) kepada deler. Surat yang ditunjukan kedeler merupakan surat order kendaraan yang telah disetujui pihak konsumen[[15]](#footnote-15).

Setelah konsumen datang ke deler, maka konsumen dan pihak BNI Multifinance membuat surat perjanjian pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak Multifinance yang wajib dihadiri oleh suami isrti untuk sama-sama menandatangani surat perjanjian tersebut. Menurut Usman Saudi dalan surat perjanjian pembiyaan walaupun BPKB dan STNK atas nama penerima kridit surat perjanjian tetap berisikan perjanjian sewa dengan asalan karena kendaraan tersebut dalam proses pengkriditan.

**Analisa Implementasi Akad Pembiayaan Jual Beli di BSM dan BNIF dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

Dengan memperhatikan hasil penelitian kedua lembaga keuangan diatas penulis akan menganalisa baik kesamaan ataupun perbedaan kedua bank yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Bandar jaya dan Bank Negara Indonesia Multifinance Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Analisa Proses Jual Beli Kendaraan Menurut Bank Syariah Mandiri

1. Pengajuan permohonan nasabah

Nasabah yang menginginkan untuk memiliki kendaraan datang ke bank syariah mengajukan permohonan pembelian sebuah kendaraan dengan angsuran, dan bank syariah menerima nasabah tersebut dan bank mempertanyakan kesungguhan nasabah, jika nasabah sungguh-sungguh untuk memiliki kendaraan tersebut maka bank mengecek kedeler apakah kendaraan yang diinginkan nasabah tersebut ada, jika ada kendaraan sesuai atas permintaan nasabah dan nasabah setuju maka bank syariah meminta data identitas dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi.

Dari uraian diatas jika kita hubungkan dengan fatwa dewan syariah nasional no. 04 tahun 2000 tentang ketentuan *murabahah* angka satu nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset pada bank telah sesuai.

1. Survei di lapangan.

Setelah data nasabah diterima dan lengkap sesuai persyaratan yang telah diberikan oleh bank syariah, maka pihak bank turun kelapangan untuk survei dalam hal ini untuk memenuhi unsur kehati-hatian perbankan, dan ingin mengetahui kesesuaian data pribadi yang telah diberikan kepada bank. Pelaksanaan pada survei ini kalau kita hubungkan dengan undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 35 bank syariah di tuntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.

1. Pengajuan permohonan ke komite pembiayaan.

Selanjutnya acoun oficer (AO) menganalisa hasil survei dari lapangan jika hasil survei nya nasabah dianggap layak atau tidak maka acoun oficer (AO) memberitahukan kepada nasabah, seandainya nasabah tersebut layak dan nasabah menerima untuk dilanjutkan transaksi pembelian kendaraan maka acoun oficer mengajukan surat permohonan kepada komite pembiayaan, bahwa nasabah berdasarkan hasil survei adalah layak untuk dilanjutkan, selanjutnya komite pembiayaan mengadakan rapat dengan acoun oficer (AO) menganalisa hasil survei dan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran yang akan disepakati, setelah komite pembiayaan mengadakan rapat jika nasabah tersebut di tolak maka komite pembiayaan memberitahukan kepada nasabah secara lisan bahwa saudara di tolak dan jika diterima maka komite pembiayaan mengirimkan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) kepada calon nasabah.

1. Penerbitan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3)

Setelah nasabah diterima oleh komite pembiayaan selanjutnya penerbitan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) bahwa nasabah tersebut dapat melakukan pembiayaan yang telah disetujui. Dalam surat penegasan persetujuan telah tercantum segala hal yang meliputi struktur pembiayaan dn persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum nasabah direalisasikan dan dalam struktur pembiayaan seperti harga pokok dan keuntungan telah ditetapkan oleh bank dan tidak ada tawar menawar.

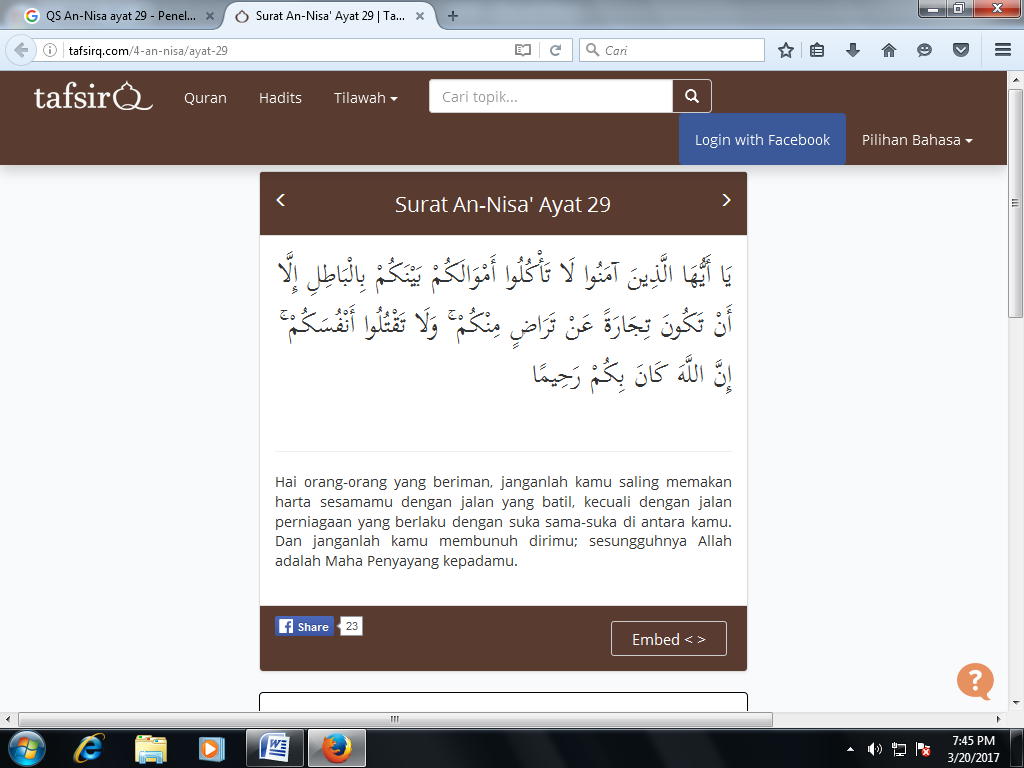
Sebagaimana hasil penelitian di bank syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah bahwa keuntungan yang diperoleh adalah 26,80% selama 60 bulan. Selanjutnya jika nasabah tersebut telah setuju sebagai mana telah ditetapkan didalam surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) ke proses selanjutnya penanda tanganan akad.

1. Penanda tanganan akad

Sebagai mana telah diuraikan diatas dalam penerbitan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) telah ditetapkan struktur pembiayaan seperti harga pokok, keuntungan dan biaya lainnya dengan jelas. Jika nasabah setuju maka dilanjutkan penanda tanganan akad pada saat penanda tanganan akad tidak ada tawar menawar menganai keuntungan yang telah ditetapkan oleh bak syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah dengan alasan telah ditetapkan dari pusat. Setelah penanda tanganan akad nasbah menerima kendaraan yang langsung diserahkan ke deler pada saat itu.

Dari uraian diatas jika kita hubungkan dengan jual beli menurut pandangan hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

Pandangan Al-Quran surat Annisa ayat 29

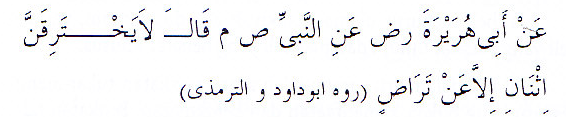


*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*

Dari pandangan Al-Quran surat Anisa ayat 29 diatas dapat kita pahami bahwa dalam proses jual beli ataupun perniagaan harus dilaksanakan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan salah satu pihak yang menerima karena keterpaksaan. Selanjutnya kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan jual beli kendaraan dengan angsuran di bank syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah diatas, jika pada pelaksanaan akad ada unsur suka sama suka maka akad perjanjian tersebut dianggap sah sebagai mana pendapat Imam Hambali dalam akad jual beli syarat nya harus berupa perkataan yang dapat menunjukan persetujuan dan suka sama suka antara dua belah pihak.

Menurut Hadis

Manusia diperbolehkan untuk membuat akad juga didasarkan pada dalil hadis Rosulullah bersabda :

1. 

*“Dari Abi Hurairah. r.a dari Nabi saw bersabda : janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi”* (Riwayat Abu Daud dan Timizi).

1. 

*“Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya jual beli sah dengan saling merelakan”* (Riwayat Ibnu Hiban dan Ibnu Majah).

Dari pandangan hadis diatas dapat dipahami bahwa dalam akad transaksi jual beli harus menunjukan kerelaan (keridhoan) diantara kedua belah pihak sehingga tidak akan menimbulkan akibat ada yang dirugikan atau ada yang di untungkan. Selanjutnya kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan jual beli kendaraan dengan angsuran di bank syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah di atas, jika pada pelaksanaan akad perjanjian ada unsur saling meridho dan saling merelakan maka akad perjanjian tersebut dianggap sah sebagaimana pendapat Imam maliki shigat harus merupakan sesuatu yang dapat menunjukan ridho (saling setuju) dan pihak akid baik berupa perkataan atau isyarat dan tulisan.

(3) Jual beli menurut ahli hukum ekonomi syariah.

Menurut Wahbah az-zuhaili, dalam *murabahah* ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli *murabahah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat mengetahui harga pokok atau harga asal ini juga diperuntukan bagi jual beli *at-tauliyah* dan *al-wadhi’ah.*

Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui si pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Oleh karena itu harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti nilai mata uang.

Dari uraian wahbah az-zuhaili diatas kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan jual beli kendaraan dengan angsuran di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya Lampung tengah sudah sesuai karena dalam struktur pembiayaan nya sudah jelas baik harga pokok, margin (keuntungan) dan angsuran sudah jelas.

* 1. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no.4 tahun 2000 tentang ketentuan umum *murabahah.*

Fatwa dewan syariah nasional merupakan landasan hukum dalam akad *murabahah* terhadap sah nya jual beli dalam Fatwa DSN ini pada angka 6 bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Dari uraian Fatwa Dewan Syariah Nasional diatas kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan jual beli kendaraan dengan angsuran di bank syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah sudah sesuai dikarenakan dalam struktur pembiayaanya sudah jelas baik harga pokok, margin (keuntungan), dan angsuran serta biaya lainnya.

* 1. Menurut undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Di Indonesia dalam pelaksanaan jual beli berdasarkan syariah telah diatur oleh undang-undang no.21 tahun 2008 dan sahnya jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (KUH-Perdata) buku tiga pasal 1320. Menurut undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 huruf d bank syariah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad ijtisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dari uraian undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 huruf d diatas kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan jual beli kendaraan di bank syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah bahwa bank tersebut harus menjalankan dalam akad perjanjiannya sesuia ketentuan syariah, kalau kita pahami dari pandangan Al-Quran, Al-Hadis, dan pandangan ulama ahli hukum ekonomi syariah serta fatwa DSN MUI maupun undang-undang no.21 tahun 2008 pelaksanaan jual beli di bank syariah mandiri telah sesuai ketentuan syariah.

1. Analisis Proses Jual Beli Kendaraan di Bank Negara Indonesia Multifinance.
2. Pengajuan Permohonan Nasabah.

Nasabah yang ingin memiliki kendaraan datang ke bank negara indonesia multifinance, setelah nasabah ketemu pihak multifinance mempertanyakan berapa harga kendaraan yang ingin dibeli nasabah tersebut kemudian pihak multifinance langsung memberikan brosur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak bank negara indonesia multifinance dimana brosur tersebut telah ditetapkan harga dan angsuran nya dan bagi nasabah yang menginginkan kendaraan maka diminta data identitas.

1. Survei di lapangan

Berdasarkan data identitas nasabah tersebut maka pihak bank negara indonesia multifinance turun lapangan untuk mengecek kebenaran nasabah apakah kemampuan pembayarannya angsuran tidak akan terjadi kemacetan. Dan survei ini merupakan unsur kehati-hatian pihak perbankan sebagai mana pasal 2 undang-undang no.10 tahun 1998 bahwa perbankan indonesia dalam melaksanakannya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan undang-undang no.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

1. Order kendaraan ke deler

Berdasarkan hasil survei jika nasabah diterima maka pihak bank negara indonesia multifinance memberikan informasi kepada nasabah dengan surat keputusan jika nasabah setuju maka pihak bank negara indonesia multifinance mengeluarkan surat paimen order kepada deler untuk memesan kendaraan yang diinginkan nasabah, nasabah langsung ke deler untuk memilih kendaraan yang ia kehendaki.

1. Penanda tanganan perjanjian

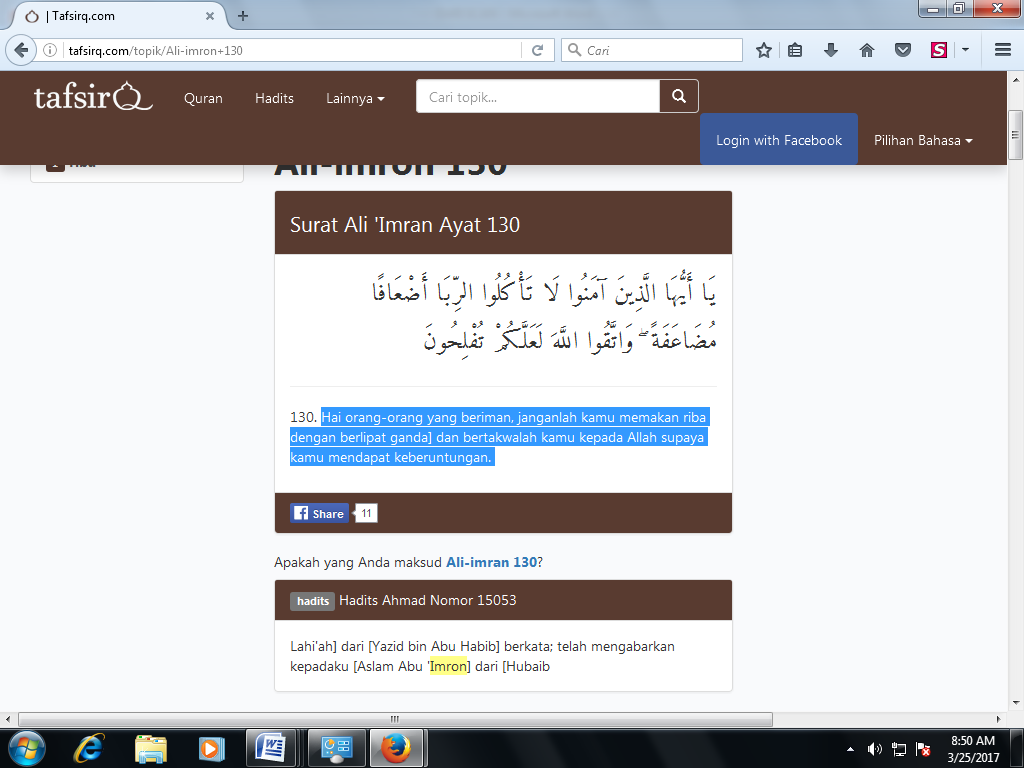
Setelah Bank Negara Indonesia Multifinance membuat surat paimen order dan nasabah telah memilih kendaraan maka dilanjutkan penanda tanganan perjanjian. Didalam perjanjian ini struktur pembiayaan telah ditetapkan pihak bank negara indonesia multifinance seperti harga pokok namun keuntungan tidak dijelaskan didalam struktur pembiayaan tersebut dengan alasan mengikuti ketentuan naik turunnya bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh bank negara indonesia multifinance maka saya sebagai penulis di sub pokok pembahasan sebelumnya dibuat kan struktur pembiayaan yang mirip dengan struktur pembiayaan bank syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah. Setelah dihitung keuntungan yang diperoleh bank negara indonesia multifinance KCP Kota Bandar Lampung lebih besar dari keuntungan bank syariah mandiri KCP Bandar Jaya, keuntungan bank negara indonesia multifinance sebesar 64,39% angsuran selama 60 bulan.

Selanjutnya pada pelaksanaan perjanjian nasabah hanya mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank negara indonesia multifinance, setelah perjanjian dilaksanakan maka nasabah langsung menerima kendaraan yang diberikan oleh deler. Selanjutnya sahnya suatu perjanjian bank negara indonesia multifinance berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (KUH-Perdata) pasal 1320 buku tiga dan undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan dan undang-undang no.3 tahun 2004 tentang bank indonesia.

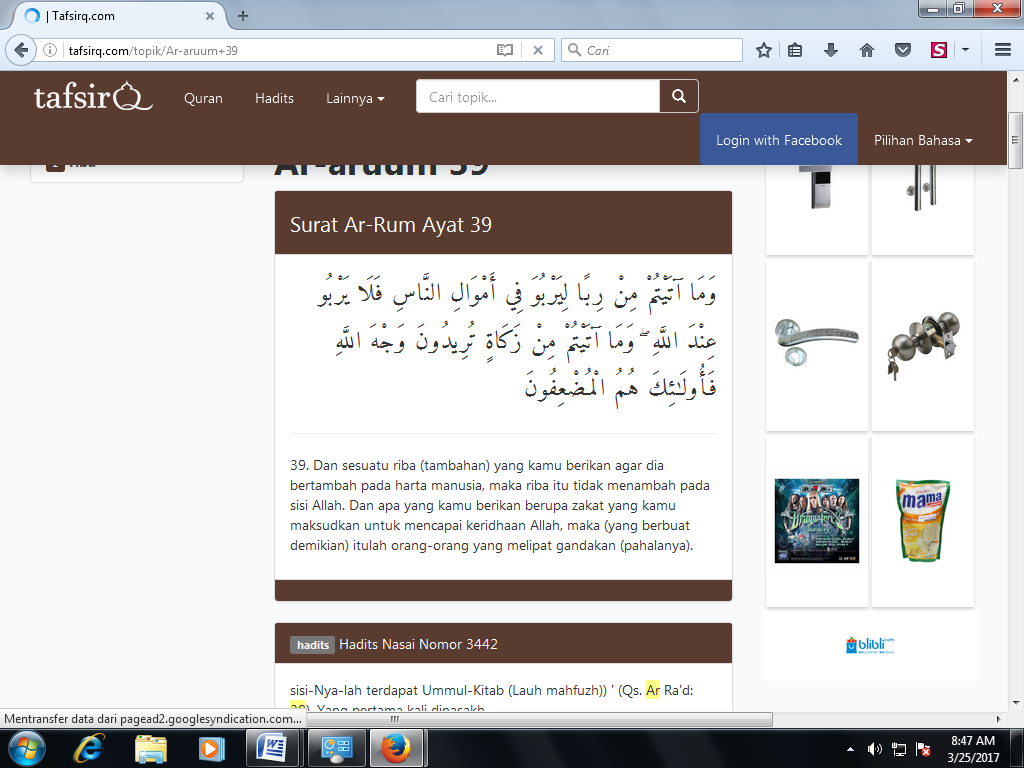
Dari uraian diatas kalau kita hubungkan dengan konsep hukum ekonomi syariah yaitu:

1. Pandangan Al-Quran.

Surat Ali-Imran 130



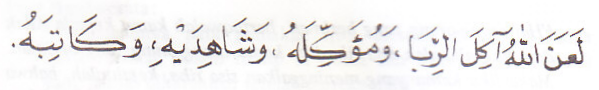
*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

Surat Ar-ruum 39

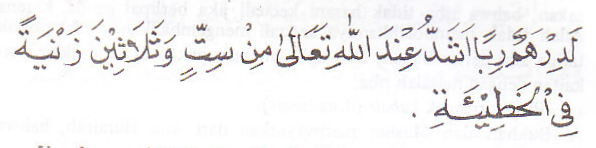
*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). “*

1. Hadis Nabi Muhammad SAW.

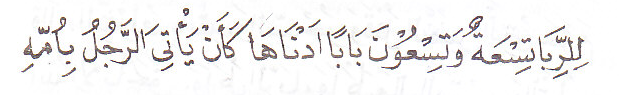
Allah melaknat semua pihak yang turut serta dalam akad riba; Dia melaknat orang yang hutang yang mengambilnya, dan orang yang menghutangkannya, penulis yang mencatatnya dan saksi-saksinya. Seperti diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud dan At Tirmizi yang mengshahihkannya dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw, bersabda :



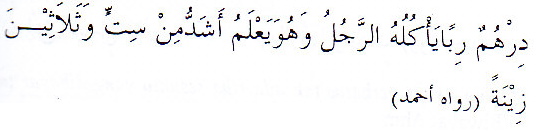
*“ Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya”.*



*“Untuk satu dirham riba di sisi Allah lebih berat dari tiga puluh enam kali berzina menurut (ukuran) kesalahan”.*



*“Untuk riba ada 99 (sembilan puluh Sembilan) pintu dasa, yang paling rendah (derajatnya, seperti) seseorang yang menzinahi ibunya”.*



*“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa enam puluh kali zina”* (Riwayat Ahmad)

Berdasarkan perintah Al-Quran dan hadis diatas kalau kita kaitkan dengan jual beli kendaraan dengan angsuran pada Bank Negara Indonesia Multifinance KCP Kota Bandar Lampung diatas yang jual belinya dengan menggunakan sistem bunga maka kita sebagai umat islam dilarang oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Jika tetap kita lanjutkan jual beli tersebut maka kita telah ingkar pada Allah SWT dan berdosa.

Dari hasil analisa implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan dengan angsuran di bank syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah dan bank negara indonesia multifinance dalam perspektif hukum ekonomi syariah diatas dapat disimpulkan ada kesamaan dan perbedaan dikedua bank sebagai berikut:

1. Kesamaan

Baik bank syariah mandiri maupun bank negara indonesia multifinance ada kesamaan pada:

1. Persyaratan nasabah;
2. Survei dilapangan;
3. Penetapan struktur pembiayaan;
4. Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320 buku III.
5. Perbedaannya

Baik bank syariah mandiri maupun Bank Negara Indonesia Multifinance ada perbedaan pada:

1. Penentuan pembiayaan yang diinginkan nasabah.

Bank syariah mandiri dalam penentuan pembiayaan secara bertahap setelah survei jika nasabah diterima oleh bank syariah mandiri maka acoun oficer (AO) mengajukan surat permohonan kepada komite pembiayaan menyetujui maka dikeluarkan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) selanjutnya mengadakan perjanjian akad. Berbeda dengan bank negara indonesia multifinance setelah survei jika nasabah diterima maka pihak multifinance mengeluarkan surat keputusan menerima nasabah dan langsung mengirim surat kepada deler yaitu surat paimen order dilanjutkan penanda tanganan perjanjian.

1. Struktur pembiayaan.

Bank syariah mandiri struktur pembiayaannya jelas baik harga pokok, keuntungan dan angsurannya, namun di bank negara indonesia multifinance keuntungan yang diperolehnya tidak dijelaskan dalam struktur pembiayaan.

1. Keuntungan.

Bank syariah mandiri keuntungannya lebih rendah dibandingkan dengan bank negara indonesia multifinance.

1. Landasan hukum.

Bank syariah mandiri berlandaskan hukum islam dan hukum positif sedangkan bank negara indonesia multifinance hanya hukum positif saja.

* + - 1. **Implementasi Akad Murabahah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah**

Dari hasil analisa Implementasi akad pembiayaan jual beli di Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia Multifinance dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah diatas ini akan diuraikan konsep Hukum Ekonomi Syariah dihubungkan dengan pelaksanaan jual beli kendaraan dengan angsuran di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah dan Bank Negara Indonesia Multifinance sebagai berikut:

Penyajian Data Lapangan Bank Syariah Mandiri dan BNI Multifinance.

1. Proses jual beli kendaraan menurut Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah dalam mengajukan permohonan dan bank memberitahukan persyaratan yang harus di penuhi dan di setujui oleh Nasabah maka berlanjut kepada proses tahapan yang harus di lalui seperti:

1. Nasabah menyiapkan identitas pribadi atau Badan Hukum;
2. Bank mengadakan verifikasi berkas dan turun lapangan;
3. Jika diterima maka Bank menyiapkan surat permohonan kepada komite pembiayaan;
4. Jika di setujui Komite Pembiayaan maka langkah selanjutnya penerbitan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP.3) yang meliputi struktur pembiayaan dan persyaratan lainnya. Perlu penulis sampaikan bahwa struktur pembiayaan salah satunya adalah berisikan tentang margin (keuntungan bank) yang telah ditentukan oleh bank termasuk angsurannya tanpa kompromi dengan nasabah.
5. Penandatanganan akad;
6. Setelah penandantanganan akad maka pihak bank menghubungi deler untuk membeli kendaraan;
7. Kendaraan diterima oleh Nasabah.
8. Proses jual beli menurut Bank Negara Indonesia Multifinance.

Bank Negara Indonesia Multifinance merupakan lembaga keuangan konvensional yang mempunyai proses tahapan jual beli kendaraan dengan angsuran sebagai berikut;

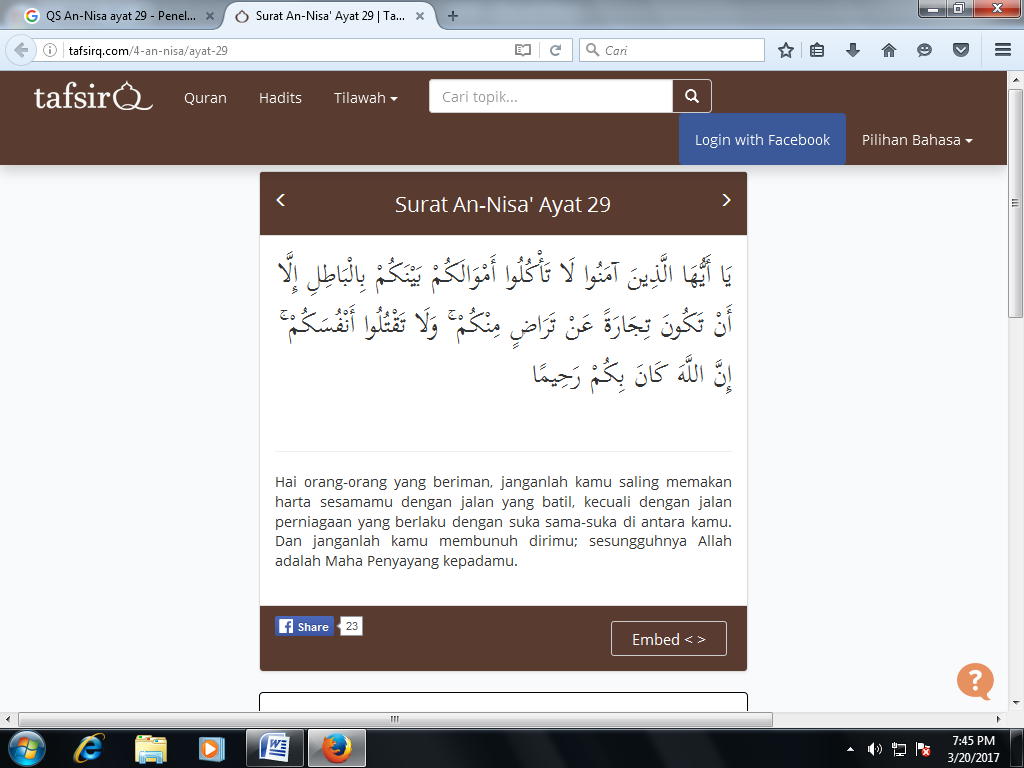
1. Konsumen menyiapkan identitas pribadi atau badan hukum;
2. Bank mengadakan verifikasi berkas dan turun lapangan;
3. Jika diterima maka pihak Multifinance mengeluarkan surat keputusan untuk menerima konsumen tersebut;
4. Setelah sama-sama sepakat maka pihak multifinance mengeluarkan surat Paimen Order kepada deler;
5. Konsumen ke deler untuk memilih kendaraan;
6. Penandatanganan surat perjanjian

Dalam penandatangan surat perjanjian semua ketentuan sudah ditentukan oleh pihak multifinance seprti struktur pembiayaan serta persyaratan lainnya yang tidak ada kompromi dengan konsumen.

Jual beli kendaraan di Bank Syariah Mandiri dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1. Menurut AL-Qur’an

*Murabahah* tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-qur’an dan hadis, yang ada hanyalah referensi jual beli atau perdagangan. Untuk itu referensi yang dirujuk untuk *murabahah* adalah Nash Al-qur’an, Hadis maupun ijma’ adapun jual beli atau perniagaan yang dikehendaki Al-qur’an sebagaimana firman Allah swt. QS.An.Nisa ayat 29:



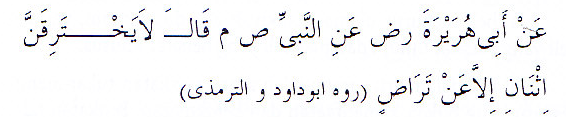
*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa dalam proses jual beli ataupun perniagaan harus dilaksanakan suka sama suka tanpa ada unsur perasaan salah satu pihak yang menerima karena keterpaksaan. Selanjutnya kalau kita memperhatikan hasil analisa implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah. (pada poin d), jika disetujui komite pembiayaan maka langkah selanjutnya penerbitan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP.3) yang meliputi struktur pembiayaan dan persyaratan lainnya.

Dapat kita pahami bahwa struktur pembiayaan berisikan tentang, angsuran dan harga kendaraan beserta keuntungan (margin) yang telah ditetapkan secara sepihak oleh Bank Syariah Mandiri dengan jelas struktur pembiayaannya. Dari uraian ini kalau kita hubungkan dengan firman Allah swt, QS.An-Nisa ayat 29 tersebut diatas jika nasabah menerima dengan keikhlasan dan suka sama suka serta saling sepakat maka jual belinya dianggap sah.

1. Menurut Al-Hadis

Hadis merupakan landasan hukum Islam setelah Al-qur’an yang membicarakan jual beli diantara kedua belah pihak harus saling meridhoi dan saling merelakan sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:



*“Dari Abi Huraira.r.a dari Nabi: Janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi” (Riwayat Abu Daun dan Tirmizi)*

**

*“Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli sah dengan saling merelakan: (Riwayat Ibnu Hiban dan Ibnu Majah)*

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa dalam akad transaksi jual beli harus menunjukan kerelaan (keridhoan) di antara kedua belah pihak sehingga tidak akan menimbulkan akibat ada yang di rugikan atau yang di untungkan. Selanjutnya kalau kita memperhatikan proses pelaksanaan akad jual beli kendaraan dengan angsuran di Bank Mandiri Syariah KCP Bandar Jaya Lampung Tengah, (Poin d) Jika disetujui komite pembiayaan maka langkah selanjutnya penerbitan surat penegasan persetujuan pembiayaan yang meliputi struktur pembiayaan dan persyaratan lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa struktur pembiayaan berisikan angsuran dan harga pokok ditambah keuntungan namun di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah pelaksanaan proses jual beli pihak bank telah menetapkan struktur pembiayaan secara jelas. Kalau kita pahami hadis diatas bahwa dalam jual beli harus saling meridhoi dan saling merelakan jika kita hubungkan dengan pelaksanaan jual beli di Bank Syariah Mandiri di atas jika nasabahnya ridho dan rela serta saling sepakat bukan karena keterpaksaan maka jual beli tersebut dianggap sah.

Jual beli menurut Al-Qur’an dan Hadis diatas dalam kaitan pelaksanaan jual beli bank syariah mandiri dapat kita hubungkan dengan sah nya akad perjanjian sebagai berikut: menurut; Abdul Ghofur Ansori dalam buku yang berjudul pokok-pokok hukum perjanjian islam di Indonesia dalam kontek hukum islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian yaitu:

1. Kebebasan;
2. Persamaan dan kesetaraan;
3. Keadilan;
4. Kerelaan;
5. Kebeanaran dan Kejujuran;
6. Tertulis.

Kalau kita hubungkan dengan hasil pelaksanaan jual beli bank syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah tersebut dengan asas-asas hukum perjanjian islam diatas jika asas tersebut terpenuhi diantara pihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah maka jual beli tersebut dapat dianggap sah.

1. Menurut Ulama dan Para Ahli Ekonomi Islam

Kata *murabahah* secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna : saling) yang diambil bahasa Arab, yaitu ar-ribhu (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan)[[16]](#footnote-16). Jadi *murabahah* diartikan dengan saling menambah (menguntungkan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan. Dalam ilmu fiqh, *murabahah* diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.[[17]](#footnote-17) Muhammad Syafi’i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini. Penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya[[18]](#footnote-18).

Ivan Rahmawan A mendefinisikan *murabahah* sebagai suatu kontrak usaha yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih dimana keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapat dari *mark-up* harga sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasa.[[19]](#footnote-19)

Heri Sudarsono mendefinisikan *murabahah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah,* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu[[20]](#footnote-20).

Abdullah Saeed mendefinisikan *murabahah* sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga mencari jasa seorang perantara.[[21]](#footnote-21)

Dari berbagai definisi dapat disimbulkan beberapa hal pokok bahwa akad *murabahah* terdapat ;

1. Pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dengan definisi ini, maka *murabahah* identik dengan *ba’i bitsaman ajit.*
2. Barang yang dibeli menggunakan harga asal.
3. Terdapat tambahan keuntungan (komisi, *mark-up* harga, laba) dari harga asal yang telah disepakati.
4. terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak (Pihak bank dan nasabah) atau dengan kata lain, adanya kerelaan di antara keduanya.
5. Penjual harus menyebutkan harga barang kepada pembeli (memberi tahu harga produk).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April tahun 2000 terhadap ketentuan umum *murabahah* dalam bentuk Bank Syariah angka (6) yaitu: Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Menurut undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya pada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Dari uraian pandangan Al-Quran dan Hadis serta pendapat ulama, para ahli ekonomi islam, fatwa dewan syariah nasional, dan undang-undang no.21 tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf d. Diatas dapat kita hubungkan dengan temuan penelitian terhadap proses jual beli kendaraan di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah yang telah menetapkan struktur pembiayaan dengan jelas baik harga pokok, keuntungan, menurut pandangan diatas dapat dianggap sah jika struktur pembiayaan disepakati bersama dan saling suka sama suka dan meridhoi.

Dari uraian diatas dapat kita hubungkan dengan sah nya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang meliputi:

* + - * 1. Kesepakatan, yaitu para pihak yang melakukan perjanjian saling sepakat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
        2. Cakap, yaitu pihak yang melakukan perjanjian haruslah cakap menurut hukum, dimana pihak tersebut haruslah berusia 21 tahun atau yang telah menikah.
        3. Mengenai hal-hal tertentu, yaitu mengenai objek yang berada dalam perjanjian tersebut haruslah dijeslakan.
        4. Suatu sebab yang halal yaitu perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatas, maka dalam hukum islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian yaitu:

1. Kebebasan;
2. Persamaan atau Kesetaraan;
3. Keadilan;
4. Kebenaran dan Kejujuran;
5. Tertulis.

Menurut; Samsul Anwar dalam buku yang berjudul Hukum Perjanjian Syariah, studi tentang teori akad dalam fikih muamalah tahun 2007, menyatakan bahwa suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi dan tidak sah apabila rukun dan syarat-syarat yang dimaksud tidak dipenuhi. Di bahwah ini akan dijelaskan tentang rukun dan syarat-syarat akad *murabahah* sebagai berikut:

Rukun *murabahah* yaitu:

1. Pernyataan kehendak;
2. Para pihak;
3. Objek akad;
4. Tujuan akad.

Syarat *murabahah:*

Terdapat delapan syarat terbentuknya akad *murabahah,* yaitu;

Tamyiz;

Berbilang Pihak;

Pertemuan Kehendak atau Kesepakatan;

Kesatuan Majelis;

Objek Ada Pada Waktu Akad;

Objek dapat di Transaksikan;

Objek Tertentu atau Dapat di Tentukan;

Tidak Bertentangan dengan ketentuan syariah.

Dari rukun dan syarat-syarat akad *murabahah* tersebut diatas jika kita hubungkan dengan bank syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah adalah terletak pada struktur pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak bank syariah, jika kita perhatikan secara konsep jual beli menurut Wahbah az-zuhaili, dalam *murabahah* ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli *murabahah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat mengetahui harga pokok atau harga asal ini juga diperuntukan bagi jual beli *at-tauliyah* dan *al-wadhi’ah.*

1. Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui si pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

1. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Oleh karena itu harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti nilai mata uang.

Dari uraian syarat-syarat *murabahah* yang disampaikan oleh wahbah az-zuhaili, kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan jual beli kendaraan dengan angsuran di bank syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah dapat dikatakan sah dikarenakan struktur pembiayaan yang telah di tetapkan bank syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah adalah jelas baik harga pokok, margin, keuntungan, angsuran.

Selanjutnya menurut Imam Hambali dalam akad jual beli syarat nya harus berupa perkataan yang dapat menunjukan persetujuan dan suka sama suka antara kedua belah pihak. Menurut Imam Malik Shighat harus merupakan sesuatu yang dapat menunjukan ridho (saling setuju) dan pihak akid baik berupa perkataan atau isyarat dan tulisan.

Dari uraian kedua Imam yaitu Imam Hambali dan Imam Maliki tersebut diatas kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan jual beli kendaraan dengan angsuran di bank syariah mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah, jika nasabah nya dan Bank Syariah shigoht dan saling suka sama suka serta saling meridhoi atas struktur pembiayaan yang telah ditetapkan Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah maka akad perjanjian jual beli dapat dikatakan sah.

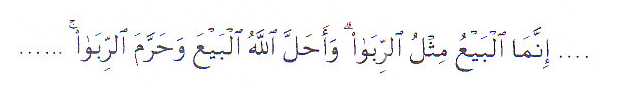
Implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan pandangan Al-Quran, Al-Hadis, Ulama dan Ahli Ekonomi Islam, Fatwa DSN MUI, serta Undang-undang N0.21 tahun 2008 penetapan struktur pembiayaan jual beli kendaraan di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah yang telah ditetapkan oleh Bank secara jelas, baik harga, pokok, keuntungan yang diperoleh bank jika disepakati dengan suka sama suka dan saling merelakan maka jual belinya dapat dikatakan sah.

Selanjutnya dari semua pandangan diatas kalau kita tinjau dari pendapat wahbah az-zuhaili yang menyatakan jika bank telah menetapkan struktur pembiayaan, baik harga pokok, keuntungan yang diperoleh bank dengan jelas maka jual beli itu dapat dikatakan sah. Dan menurut imam Hambali dan imam Maliki menyatakan sah nya akad jual beli, jika diantara dua belah pihak sepakat dan saling suka sama suka serta saling meridhoi.

Jual Beli Kendaraan di Bank Negara Indonesia Multifinance dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

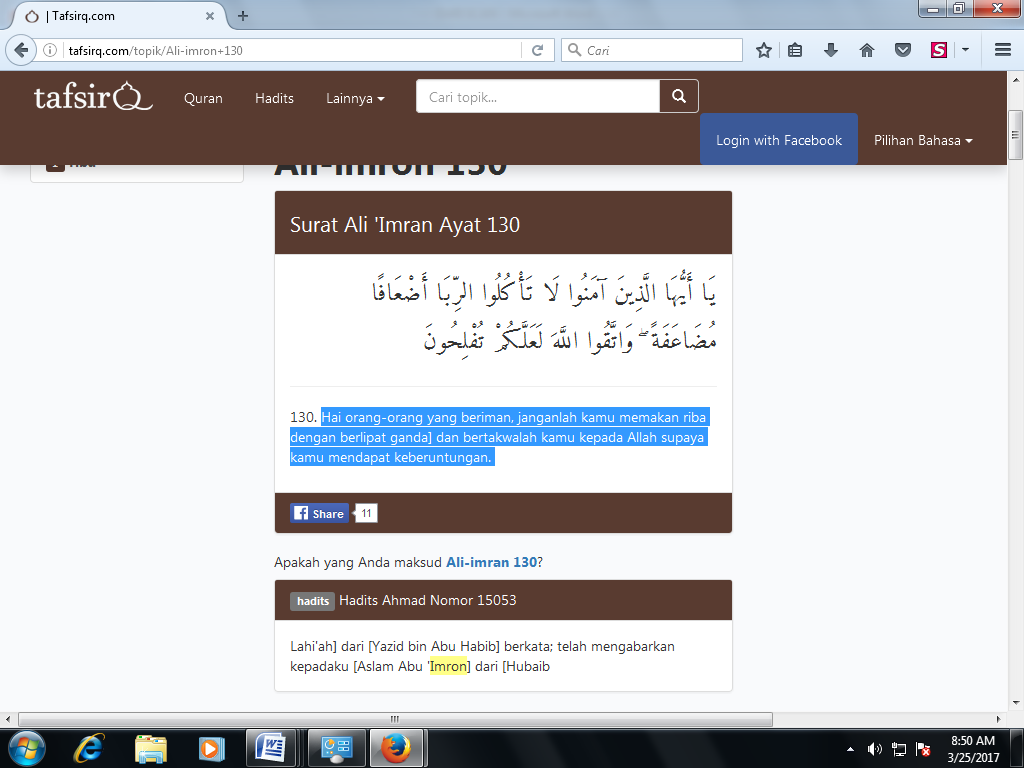
Sebagai mana kita ketahui bahwa Bank Negara Indonesia Multifinance merupakan lembaga pembiayaan konvensional, dalam hal jual beli keuntungannya berdasarkan bunga yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut dalam proses jual beli kendaraan dengan angsuran di Bank Negara Indonesia Multifinance di bawah ini akan ditinjau dari konsep hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Menurut Al-Quran
2. Firman Allah SWT Q.S Al-baqoroh 275

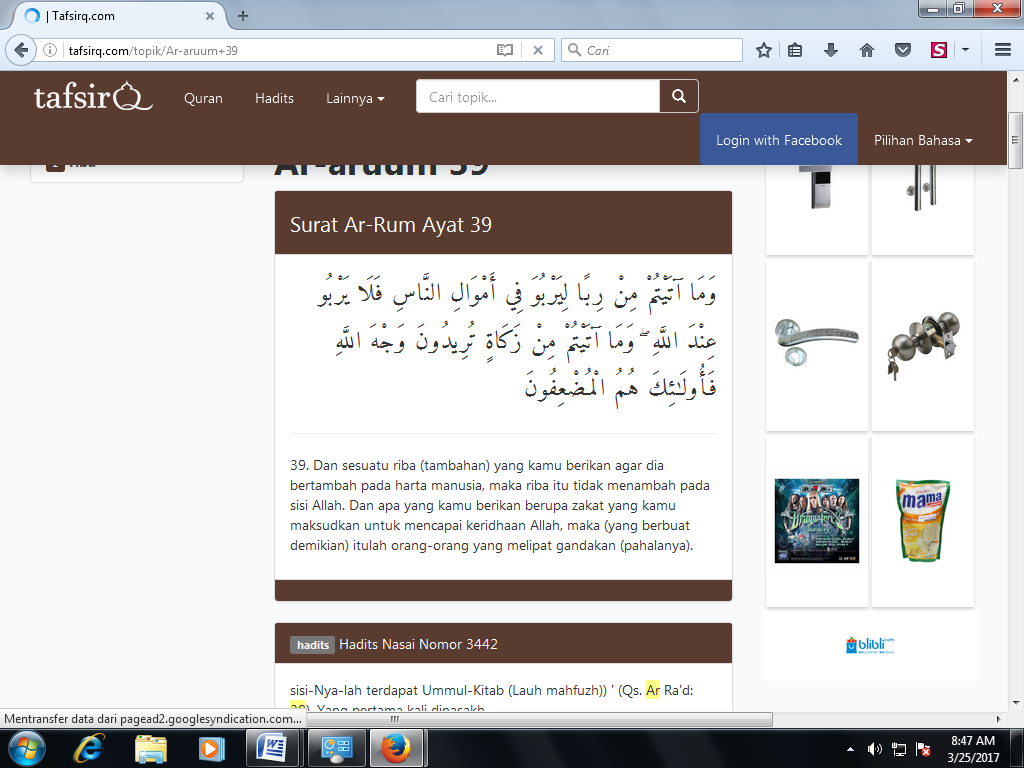


*…..Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…*

1. Firman Allah SWT Q.S Ali-Imron 130



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

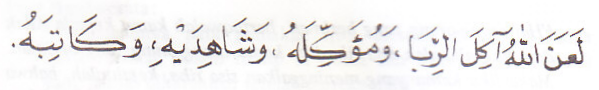
1. Firman Allah SWT Q.S Ar-Ruum 39

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). “*

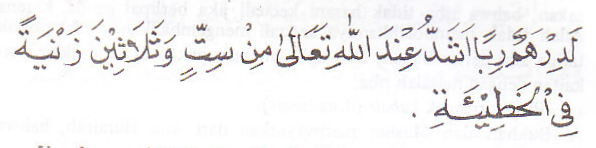
Dari firman Allah SWT diatas dapat kita pahami bahwa Allah SWT melarang kita dalam jual beli dengan angsuran adanya unsur riba kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan jual beli kendaraan dengan angsuran di Bank Negara Indonesia Multifinance diatas adalah haram dikarenakan struktur pembiayaannya ditetapkan berdasarkan unsur bunga.

1. Menurut Hadis

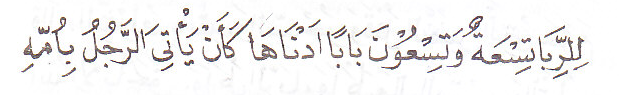
Allah melaknat semua pihak yang turut serta dalam akad riba; Dia melaknat orang yang hutang yang mengambilnya, dan orang yang menghutangkannya, penulis yang mencatatnya dan saksi-saksinya. Seperti diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud dan At Tirmizi yang mengshahihkannya dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw, bersabda :



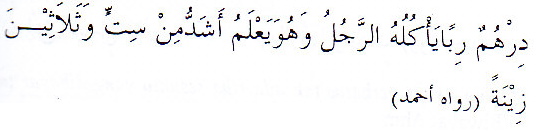
*“ Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya”.*



*“Untuk satu dirham riba di sisi Allah lebih berat dari tiga puluh enam kali berzina menurut (ukuran) kesalahan”.*



*“Untuk riba ada 99 (sembilan puluh Sembilan) pintu dasa, yang paling rendah (derajatnya, seperti) seseorang yang menzinahi ibunya”.*

**

*“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa enam puluh kali zina”* (Riwayat Ahmad)

Dari hadis diatas dapat kita pahami bahwa lembaga yang meneyediakan pembiayaan serta saksi-saksi nya dan penulisnya akan dilaknat oleh Allah SWT apabila menggunakan sistim jual beli dengan angsuran menggunakan bunga. Kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan jual beli kendaraan dengan angsuran di Bank Negara Indonesia Multifinance dalam struktur pembiayaannya yang menggunakan bunga adalah haram.

1. Pandangan Ulama Hukum Ekonomi Syariah
2. Menurut Yusuf Qaradhawi, Mutawali sya’rawi, Abu Zahrah mengatakan bahwa bunga bank itu adalah haram karena termasuk riba selanjutnya menurut Mufti Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.
3. Sidang Organisasi Konfrensi Islam (OKI) di Karaci, Pakistan bulan desember 1970 menyepakati dua hal utama yaitu:
4. Praktek bank dengan sistem bunga adalah haram tidak sesuai syariat islam.
5. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan oprasi nya sesuai dengan prinsip syariah.
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Ijtima’ ulama komisi fatwa majelis ulama di Indonesia (MUI) se Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koprasi dan lembaga keungan lainnya maupun individu yang melakukan praktek pembungaan uang adalah haram.

Dari pandangan Al-Qur’an, Al-Hadis, Ulama Hukum Ekonomi Syariah diatas kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan jual beli kendaraan di Bank Negara Indonesia Multifinance yang telah menetapkan struktur pembiayaannya berdasarkan bunga adalah haram. Selanjutnya dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan dengan angsuran di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Jaya Lampung Tengah dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah sesuai dengan konsep hukum islam.
2. Implementasi akad pembiayaan jual beli kendaraan dengan angsuran di Bank Negara Indonesia Multifinance KCP Kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak sesuai konsep hukum islam dikarenakan menggunakan sistem bunga.

1. Wawancara, Ahmad Marison, *Oprasional Meneger* PT. Bank Syari’ah Mandiri, pada tanggal 4 September 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wawan cara pada tanggal 4 September 2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. wawancara [↑](#footnote-ref-3)
4. Wawan cara dengan Ahmad Marison, PT.Bank Syariah Mandiri pada tanggal 18 september 2017 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawan cara dengan Ahmad Marison, PT.Bank Syariah Mandiri pada tanggal 18 september 2017 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid [↑](#footnote-ref-7)
8. . Wawancara pada tanggal 18-september-2017. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara dengan Hari Widianto, PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 25 september 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara dengan Usman Saudin, PT. BNI Multifinance pada tanggal 21 September 2018 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid.,wawancara pada tanggal 21 September 2018 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid. [↑](#footnote-ref-14)
15. Wawancara Usman Saudi, pada tanggal 21 september 2018 [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdullah al-Mushih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam,* terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.198 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid.,h. 199 [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Islam: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.101 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ivan Rahmawan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syari’ah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h.112-113 [↑](#footnote-ref-19)
20. Heri Sudarono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 62 [↑](#footnote-ref-20)
21. Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis,* terj. Arif Muftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 119 [↑](#footnote-ref-21)